



**Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

Sekretariat Tim Kerja Konektivitas MP3EI

**KLIPING
BERITA MEDIA CETAK
TIM KERJA KONEKTIVITAS**

HARI RABU, 30 JANUARI 2013



DAFTAR ISI

SPAM 1

Ruas Tol DKI 2

Tol Trans-Sumatera 3

PDAM Benahi Jaringan Pipa 4

Pembangunan Pabrik 5

Minyak Kelapa Sawit 6



Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Tim Kerja Konektivitas

Hal. Koran/Media:

Bagian:

POSITIF (+)

Halaman:

NETRAL

NEGATIF (-)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

☒ Jan

☐ Feb

☐ Mar

☐ Apr

☐ Mei

☐ Jun

☐ Jul

☐ Agt

☐ Sep

☐ Okt

☐ Nov

☐ Des

2013

☐ Kompas

☐ Media Indonesia

☐ Koran Tempo

☒ Bisnis Indonesia

☐ Republika

☐ Sinar Harapan

☐ Suara Pembaruan

☐ Pikiran Rakyat

☐ Rakyat Merdeka

☐ Seputar Indonesia

☐ Investor Daily

☐ Kontan

☐ Suara Karya

☐ Neraca

☐ Jurnal Nasional

☐ Indopos

☐ Lain-lain,

.....

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
6 Spam Digarap Dengan Skema Bisnis	<div><div>- Keenam proyek SPAM itu terdapat di PDAM Medan, Intan Banjar (Banjarmasin), Gili Trawangan (NTB), Sampit (Kalteng), Singkawang (Kalbar) dan Kab. Bogor</div><div>- Dengan mekanisme business to business, swasta dapat langsung menggarap SPAM karena tidak perlu di tenderkan karena memakan waktu</div></div>		25 tahun			Tahap studi bersama dan tender

6 SPAM DIGARAP DENGAN SKEMA BISNIS

JAKARTA-Pemerintah mengungkapkan terdapat enam proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) yang bakal digarap tahun ini dengan mekanisme *business to business* (b-to-b).

Keenam proyek SPAM itu terdapat di PDAM Medan, Intan Banjar (Banjarmasin), Gili Trawangan (NTB), Sampit (Kalteng, Singkawang (Kalbar) dan Kab. Bogor. Tiga di antara enam proyek SPAM itu sudah menemukan peminat pihak swasta.

Kepala Badan Pendukung Pengembangan SPAM Kementerian PU Rachmat Karnadi mengungkapkan skema b-to-b diatur dalam Peraturan Menteri PU.

Dengan mekanisme b-to-b, swasta dapat langsung menggarap SPAM karena tidak perlu di tenderkan karena memakan waktu. Swasta yang dipilih sudah mempunyai pendanaan tanpa harus lagi mencari dari perbankan. Adapun durasi kerja sama b-to-b selama 25 tahun. (Bisnis/27)



Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Tim Kerja Konektivitas

Hal. Koran/Media:

Bagian:

Halaman:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (-)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

☒ Jan ☐ Feb ☐ Mar ☐ Apr ☐ Mei ☐ Jun ☐ Jul ☐ Agt ☐ Sep ☐ Okt ☐ Nov ☐ Des

2013

- ☐ Kompas
- ☐ Media Indonesia
- ☐ Koran Tempo
- ☒ Bisnis Indonesia
- ☐ Republika
- ☐ Sinar Harapan
- ☐ Suara Pembaruan
- ☐ Pikiran Rakyat
- ☐ Rakyat Merdeka
- ☐ Seputar Indonesia
- ☐ Investor Daily
- ☐ Kontan
- ☐ Suara Karya
- ☐ Neraca
- ☐ Jurnal Nasional
- ☐ Indopos
- ☐ Lain-lain,

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
6 Ruas Tol DKI Sejak Awal Bukan Prioritas	<div>- Sejak ide itu bergulir pada zaman kepemimpinan Mantan Gubernur Sutiyoso, sudah menegaskan bahwa pembangunan transportasi masal harus menjadi pilihan utama</div> <div>- Prioritas harus diberikan kepada trnsportasi missal dengan cara menyelesaikan pembangunan 15 koridor Transjakarta, MRT dan Monorel</div>					

6 Ruas Tol DKI Sejak Awal Bukan Prioritas

JAKARTA—Mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso menegaskan pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota bukan menjadi prioritas dalam pembangunan sistem transportasi di Ibu Kota. Sejak ide itu bergulir pada zaman kepemimpinannya, dia sudah menegaskan bahwa pembangunan transportasi masal harus menjadi pilihan utama.

"Ide saya itu PTM atau pola transportasi makro di mana semua moda transportasi *water way*, MRT (*mass rapid transit*), monorel, dan Transjakarta itu terintegrasi," ujar Sutiyoso yang ditemui di Jakarta, Sabtu (26/1).

Menurutnya, prioritas harus diberikan kepada transportasi massal dengan cara menyelesaikan pembangunan 15 koridor Transjakarta, MRT, dan monorel. Jika moda transporatasi massal sudah tersedia, Pemprov dapat memaksa masyarakat untuk beralih ke transportasi massal.



Sutiyoso

"Ya...dipaksa lewat aturan, tapi yang penting transportasi massal itu aman, nyaman, dan tepat waktu," tegasnya.

Sotiyoso mengungkapkan pemerintah berkewajiban memberi subsidi kepada para pengguna transportasi massal. Pasalnya, pemerintah menikmati keuntungan tidak langsung, di mana jika semakin sedikit kendaraan yang berada di jalanan, maka terjadi penghematan terhadap konsumsi bahan bakar.

"Transjakarta sudah menjadi primadona transportasi di Jakarta. Nanti pemerintah wajib memberi subsidi bagi MRT, dan monorel juga," ungkapnya.

PERTIMBANGAN

Ditunda atau tidaknya pembangunan enam ruas jalan tol itu, menurutnya, bergantung pada pertimbangan Pemprov DKI. Pembangunannya dapat dilakukan jika Pemprov merasa itu perlu.

Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Jokowi mengakui bahwa Jakarta memiliki dua kekurangan yakni kekurangan jalan dan transportasi masal, sehingga akan dibangun bersamaan. Namun pascadengar pendapat, nasib enam ruas jalan tol menjadi tidak menentu.

Padahal pemegang konsesi, PT Jakarta Toll-road Development (JTD) sudah menyelesaikan seluruh proses legal administratif. Terakhir, JTD mengungkapkan sudah mendapat dukungan pendanaan dari perbankan. (Thomas Mola)

Profil 6 Proyek Jalan Tol Dalam Kota Jakarta

Ruas	Panjang (Km)	Nilai (Rp Triliun)
Semanan-Sunter	20,23	9,76
Sunter-Pulo Gebang	9,44	7,37
Duri Pulo-Kp. Melayu	11,38	5,96
Kemayoran-Kp. Melayu	9,65	6,95
UluJami-Tanah Abang	8,70	4,25
Pasar Minggu-Casablanca	9,15	5,71
Total	68,55	40,00



Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Halaman:

Tim Kerja Konektivitas

Hal. Koran/Media:

Bagian:



POSITIF (+)



NETRAL



NEGATIF (-)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

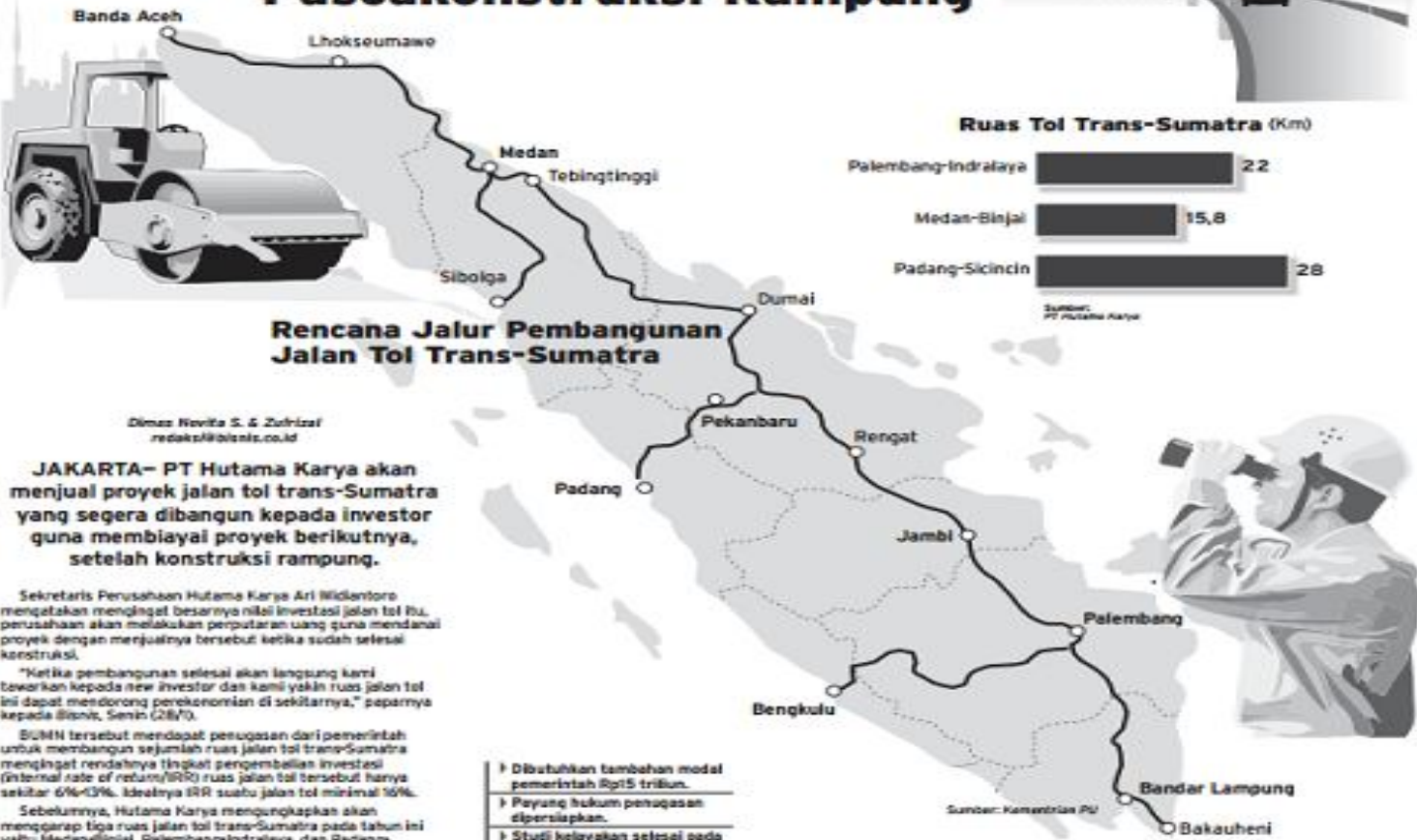
2013

- ☒ Kompas
☐ Republika
☐ Rakyat Merdeka
☐ Suara Karya
- ☐ Media Indonesia
☐ Sinar Harapan
☐ Seputar Indonesia
☐ Neraca
- ☐ Koran Tempo
☐ Suara Pembaruan
☐ Investor Daily
☐ Jurnal Nasional
- ☐ Bisnis Indonesia
☐ Pikiran Rakyat
☐ Kontan
☐ Indopos
- ☐ Lain-lain,

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
Hutama Karya Jual Proyek Pascakonstruksi Rampung	- PT. Utama Karya menjual proyek jalan tol trans-sumatera yang segera dibangun kepada investor guna membiayai proyek berikutnya, setelah konstruksi rampung - Dibutuhkan tambahan modal pemerintah Rp.15 triliun			Rp. 360 triliun	PT. Utama Karya	

TOL TRANS-SUMATRA

Hutama Karya Jual Proyek Pascakonstruksi Rampung



JAKARTA— PT Utama Karya akan menjual proyek jalan tol trans-Sumatra yang segera dibangun kepada investor guna membiayai proyek berikutnya, setelah konstruksi rampung.

Sekretaris Perusahaan Utama Karya Ari Widiantoro mengatakan mengingat besarnya nilai investasi jalan tol itu, perusahaan akan melakukan pengumpulan uang guna mendanai proyek dengan menjualnya tersebut ketika sudah selesai konstruksi.

"Ketika pembangunan selesai akan langsung kami tawarkan kepada investor dan kami yakin ruas jalan tol ini dapat mendorong perekonomian di sekitarnya," paparnya kepada Bisnis, Senin (28/7).

BUMN tersebut mendapat pengesahan dari pemerintah untuk membangun sejumlah ruas jalan tol trans-Sumatra mengingat rendahnya tingkat pengembalian investasi (internal rate of return/IRR) ruas jalan tol tersebut hanya sekitar 6%-13%. Idealnya IRR suatu jalan tol minimal 10%.

Sebelumnya, Utama Karya mengungkapkan akan menggarap tiga ruas jalan tol trans-Sumatra pada tahun ini yaitu Medan-Binjai, Palembang-Indralaya, dan Padang-Sicincin.

Adapun jalan tol trans-Sumatra nantinya terdiri atas sejumlah ruas meliputi a.l. Bakauheni-Lampung, Pekanbaru-Dumai, Medan-Kuala Namu-Tebing Tinggi, Tegayenang-Babatan, dan tiga ruas yang akan dikerjakan oleh Utama Karya.

Sebagai langkah awal, Utama Karya akan membangun proyek jalan tol Medan-Binjai sepanjang 15,8 kilometer senilai Rp3,4 triliun dengan membentuk anak usaha bernama PT Hutama Prasana Nusantara.

Untuk membentuk anak usaha ini, PT Utama Karya menggandeng PT Perkebunan Nusantara II, III, dan IV, serta perusahaan daerah PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara.

TAMBAHAN MODAL

Ditutur Utama Karya Tri Widiyanto mengatakan perusahaan akan mencari dukungan pendanaan guna membiayai proyek jalan tol yang kurang layak secara keuangan itu.

Selain meminta tambahan modal dari pemerintah melalui pinjaman modal negara (PNM) sebesar Rp5 triliun, obligasi negara, akuisisi pinjaman bank dengan bunga rendah, perusahaan juga akan mencari mitra strategis untuk mengoperasikan jalan tol tersebut nantinya.

"Kalau setelah dibangun kemudian kami sendiri yang

- ▶ Dibutuhkan tambahan modal pemerintah Rp15 triliun.
- ▶ Payung hukum pengesahan dipersiapkan.
- ▶ Studi kelayakan selesai pada Maret 2013.

langsung mengoperasikannya, maka uang kami akan berhenti di sana tidak berputar. Oleh karena itu perusahaan membutuhkan partner untuk mengelola operasional tol tersebut," paparnya.

Adapun nilai investasi dari tol yang membentang dari Lampung hingga Aceh tersebut diaksir mencapai Rp360 triliun, dengan rincian Rp330 triliun investasi konstruksi, dan sisanya untuk pembiayaan pembebasan lahan.

Ari Widiantoro menuturkan perusahaan akan mengajukan tambahan modal melalui PNM. "Dari Rp15 triliun itu, kami meminta Rp5 triliun untuk tahun ini, kemudian sisanya bertahap sesuai dengan kondisi dan akan dijadwalkan nantinya."

Saat ini, lanjutnya, pengajuan PNM tersebut tengah dibahas oleh pemerintah. Sebelumnya, Menteri Keuangan Agus D.M. Marowandjaja akan memberikan dukungan penuh terkait dengan sumber pembiayaan pembangunan proyek jalan tol trans-Sumatra.

Guna merealisasikan PNM tersebut, pemerintah tengah memperkuat payung hukum pengesahan Hutama Karya sebagai badan usaha milik negara perusahaan jalan tol.

Ari menjelaskan sudah ada rapat koordinasi antara perusahaan dengan pemerintah yakni Menteri Keuangan,

Menteri Pekerjaan Umum, dan juga Sekretaris Negara terkait peraturan presiden untuk pembangunan ruas sepanjang 2.700 km tersebut.

"Perpres masih dalam proses karena ada tiga pasal dalam PP 15 sedang direvisi supaya payung hukum terhadap pengesahan kami lebih kuat," katanya.

Menurutnya, pemerintah menargetkan perpres tersebut dapat diterbitkan akhir bulan ini, akan tetapi tampaknya tidak dapat terwujud sesuai dengan jadwal.

Kendati demikian, perusahaan sudah mempersiapkan diri untuk membangun jalan tol dari Lampung hingga Aceh tersebut.

"Kami terus memantapkan desain, kajian-kajian hukum, dan juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk kerja sama baik dalam pembebasan lahan dan proses konstruksi," terangnya.

Dia memaparkan ruas tol ini akan dibangun dengan lebar 80 meter+100 meter dengan dua lajur di masing-masing ruas. Dari 2.700 km, sepanjang 2.000 km merupakan ruas utama, dan sisanya yakni berupa koridor pendukung.

Saat ini, lanjutnya, studi kelayakan proyek yang dikerjakan oleh PT Perencana Jaya tersebut dalam proses dan diharapkan dapat selesai pada Maret mendatang. ■



Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Tim Kerja Konektivitas

Hal. Koran/Media:

Bagian:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (-)

Halaman:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

2013

- ☒ Kompas
☐ Republika
☐ Rakyat Merdeka
☐ Suara Karya
- ☐ Media Indonesia
☐ Sinar Harapan
☐ Seputar Indonesia
☐ Neraca
- ☐ Koran Tempo
☐ Suara Pembaruan
☐ Investor Daily
☐ Jurnal Nasional
- ☐ Bisnis Indonesia
☐ Pikiran Rakyat
☐ Kontan
☐ Indopos
- ☐ Lain-lain,

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
PDAM Ambon Benahi Jaringan Pipa	<div>- PDAM Kota Ambon akan melakukan pembenahan jaringan pipa air bersih guna menjawab kebutuhan pelanggan dan juga dalam rangka penambahan jaringan bagi para pelanggan baru</div> <div>- Perbaikan ini dilakukan juga karena mendapat bantuan dari Pemerintah Kota Ambon maupun Pemerintah Provinsi Maluku</div>			Rp. 360 triliun	PT. Hutama Karya	

PDAM AMBON BENAHI JARINGAN PIPA

AMBON-Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Ambon akan melakukan pembenahan jaringan pipa air bersih guna menjawab kebutuhan pelanggan dan juga dalam rangka penambahan jaringan bagi para pelanggan baru.

"Kami akan melakukan pembenahan pipa karena adanya pipa jaringan yang sudah rusak dan pelanggan tambahan yang harus dilayani," kata Direktur PDAM Ambon A. Titalepta,

Rabu (30/1).
Pembenahan yang harus dikerjakan yakni pipa jaringan yang tersebar di dalam Kota Ambon melibatkan tiga kecamatan.

Pebaikan ini dilakukan juga karena mendapat bantuan dari Pemerintah Kota Ambon maupun Pemerintah Provinsi Maluku. "Kalau sampai semua jaringan sudah difungsikan, semua jaringan harus ditata ulang." (Antara)



Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Tim Kerja Konektivitas

Hal. Koran/Media:

Bagian:



POSITIF (+)



NETRAL



NEGATIF (+)

Halaman:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

☒ Jan ☐ Feb ☐ Mar ☐ Apr ☐ Mei ☐ Jun ☐ Jul ☐ Agt ☐ Sep ☐ Okt ☐ Nov ☐ Des

2013

- ☐ Kompas
- ☐ Media Indonesia
- ☐ Koran Tempo
- ☐ Bisnis Indonesia
- ☐ Republika
- ☐ Sinar Harapan
- ☐ Suara Pembaruan
- ☐ Pikiran Rakyat
- ☐ Rakyat Merdeka
- ☐ Seputar Indonesia
- ☐ Investor Daily
- ☐ Kontan
- ☐ Suara Karya
- ☐ Neraca
- ☐ Jurnal Nasional
- ☐ Indopos

☒ Lain-lain,
.....

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
Pembangunan Pabrik di Sorong	<div>- Pembangunan pabrik untuk memenuhi kebutuhan semen di Papua dan pabrik Bosowa untuk memenuhi kebutuhan di wilayahnya</div> <div>- Bupati Soorong menyebutkan dengan beroperasinya pabrik tersebut segala hasil kekayaan alam di Kabupaten Sorong tidak hanya diekspor dalam bentuk bahan mentah</div>				Pemkab Sorong	

Metrotvnews.com, Sorong: Untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD), Kabupaten Sorong, Papua Barat membangun dua pabrik baru.

Kabag Humas Kabupaten Sorong Marten Nebore, Selasa (29/1), mengatakan dua pabrik baru itu, yakni pabrik Bosowa dan pabrik Semen Gresik.

Pembangunan pabrik untuk memenuhi kebutuhan semen di Papua dan pabrik Bosowa untuk memenuhi kebutuhan di wilayahnya.

Bupati Sorong Stefanus Malak menyebutkan dengan beroperasinya pabrik tersebut segala hasil kekayaan alam di Kabupaten Sorong tidak hanya diekspor dalam bentuk bahan mentah.

Namun, bisa beralih menjadi barang jadi, sehingga harganya lebih tinggi. Sekaligus memberdayakan SDM warga setempat.

Untuk itu,segala upaya Pemda Kabupaten Sorong tersebut perlu dukungan semua warga ,agar bisa berlangsung dengan aman dan bisa mensejahterahkan warga masyarakat pada umumnya.(Martinus Solo/OL-10)



Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Tim Kerja Konektivitas

Hal. Koran/Media:

Bagian:

Halaman:



POSITIF (+)



NETRAL



NEGATIF (+)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

☒ Jan ☐ Feb ☐ Mar ☐ Apr ☐ Mei ☐ Jun ☐ Jul ☐ Agt ☐ Sep ☐ Okt ☐ Nov ☐ Des

2013

- ☐ Kompas
- ☐ Media Indonesia
- ☐ Koran Tempo
- ☐ Bisnis Indonesia
- ☐ Republika
- ☐ Sinar Harapan
- ☐ Suara Pembaruan
- ☐ Pikiran Rakyat
- ☐ Rakyat Merdeka
- ☐ Seputar Indonesia
- ☐ Investor Daily
- ☒ Kontan
- ☐ Lain-lain,
- ☐ Suara Karya
- ☐ Neraca
- ☐ Jurnal Nasional
- ☐ Indopos

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
Koreksi Harga CPO Cuma Jangka Pendek	<div>- Harga minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) menurun.</div> <div>- Ketidakstabilan pasar CPO juga terlihat dari penurunan ekspor CPO Malaysia. Selain itu, pelaku pasar cenderung menunggu hasil pertemuan ekonomi Eropa dan rapat Federal Open market Committee</div> <div>- Tarif impor CPO India menekan pergerakan harga CPO dalam jangka pendek . tapi, tarif ini justru menguntungkan dalam jangka panjang karena dapat menstabilkan permintaan CPO dari India</div>					

Koreksi Harga CPO Cuma Jangka Pendek

Buruknya data ekspor Malaysia dan tarif impor India menekan harga CPO

Agung Jatmiko

JAKARTA. Harga minyak kelapa sawit atau *crude palm oil* (CPO) menurun, setelah reli empat hari. Pemberlakuan tarif impor CPO oleh India menyebabkan ekspor CPO Malaysia mengalami penurunan yang cukup besar.

Harga CPO untuk pengiriman April 2013, Jumat (25/1), di Bursa Malaysia turun 1,49% menjadi RM 2.445 per metrik ton. Sementara, harga CPO untuk pengiriman April 2013 di Bursa Komoditi dan Derivatif, Senin (28/1), terkoreksi 1,16% menjadi Rp 7.635 per kilogram.

Data ekspor CPO Malaysia periode 1-25 Januari menunjukkan penurunan 14,1% menjadi 1,10 juta ton dibanding periode yang sama Desember 2012. Seperti kita tahu, Rabu pekan lalu, India mengumumkan kenaikan tarif dasar impor CPO sebesar US\$ 820 per

ton dari sebelumnya US\$ 447 per ton, sebagai upaya mencegah banjir CPO murah dari Indonesia dan Malaysia.

"Dalam jangka panjang, aturan ini akan mendorong India untuk memakai CPO lokal sebelum mengimpor dari Malaysia dan Indonesia," kata Alan Lim Seong Chin, analis Kenanga Investment Bank, Malaysia, kepada *PalmHQ*.

Ariana Nur Akbar, analis Monex Investindo Futures mengatakan, penurunan harga CPO ini semata-mata disebabkan oleh aksi ambil untung di akhir pekan lalu. Para pelaku pasar melihat, kenaikan tarif impor CPO di India bakal memicu penurunan permintaan CPO.

Ketidakstabilan pasar CPO juga terlihat dari penurunan ekspor CPO Malaysia. "Penguatan harga selama empat hari berturut-turut sepekan lalu dimentahkan oleh data ekspor Malaysia yang menunjukkan hasil yang tidak begitu bagus,

sehingga banyak pelaku pasar melakukan aksi ambil untung," kata Ariana.

Ibrahim, analis Harvest International Futures mengatakan, di awal pekan ini, harga CPO cenderung tertekan karena penurunan ekspor Malaysia. Selain itu, pelaku pasar cenderung menunggu hasil pertemuan ekonomi Eropa dan rapat Federal Open Market Committee.

Menurut Ibrahim, pelaku pasar cenderung mengambil posisi jual dan menunggu keluarnya pernyataan atau data baru. Ia menambahkan, tarif impor CPO India menekan

pergerakan harga CPO dalam jangka pendek. Tapi, tarif ini justru menguntungkan dalam jangka panjang karena dapat menstabilkan permintaan CPO dari India.

Koreksi harga bisa terjadi dalam dua hari. "Setelah itu akan ada peningkatan harga, khususnya setelah rapat FOMC selesai," kata Ibrahim.

Sampai akhir pekan ini, Ariana memprediksi, harga CPO akan menguat terbatas, dan bergerak berkisar RM 2.376-RM 2.470 per metrik ton. Proyeksi Ibrahim, CPO menguat terbatas di RM 2.376-RM 2.476 per metrik ton.

